

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Konsumsi Keynesian

Teori Konsumsi Keynesian yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes menjadi landasan utama dalam memahami pola konsumsi rumah tangga, termasuk rumah tangga petani. Menurut teori ini, konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diterima saat ini (*current income*), di mana peningkatan pendapatan akan mendorong konsumsi yang lebih tinggi (Minarni, 2021). Teori konsumsi Keynesian memiliki relevansi yang sangat erat dalam penelitian mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena teori Keynes menekankan bahwa konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel yang diterima masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka konsumsi cenderung mengalami peningkatan, meskipun tidak seluruh tambahan pendapatan tersebut digunakan untuk konsumsi karena sebagian akan dialokasikan ke dalam tabungan. Dengan demikian, ketiga variabel makroekonomi tersebut memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap pola konsumsi rumah tangga, baik melalui aspek pendapatan maupun kapasitas daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas hidup masyarakat akan berdampak pada peningkatan produktivitas, keterampilan, serta daya saing tenaga kerja. IPM yang tinggi mencerminkan pencapaian lebih baik dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Pendidikan yang lebih baik memungkinkan masyarakat memperoleh akses pekerjaan yang lebih produktif dan berpenghasilan lebih tinggi. Dimensi kesehatan yang

membaik akan meningkatkan harapan hidup serta kapasitas kerja, sehingga individu mampu berkontribusi lebih besar dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, dimensi standar hidup layak yang tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sekunder. Dalam perspektif Keynesian, peningkatan pendapatan yang dihasilkan melalui perbaikan IPM tersebut akan menstimulasi peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, semakin baik kualitas pembangunan manusia di suatu daerah, maka semakin tinggi pula daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperbesar pengeluaran konsumsi. Tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membatasi kapasitas konsumsi masyarakat. Rumah tangga miskin pada umumnya memiliki pendapatan disposabel yang sangat terbatas, sehingga sebagian besar pendapatannya dialokasikan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Dalam kerangka teori Keynesian, meskipun konsumsi tetap terjadi meskipun pendapatan nol atau sangat rendah (disebut konsumsi otonom), namun jumlah konsumsi yang dapat dilakukan oleh rumah tangga miskin sangat terbatas dan cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya beli mereka, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan konsumsi ketika pendapatan tidak bertambah. Bahkan, dalam banyak kasus, rumah tangga miskin terpaksa menurunkan kualitas konsumsi atau menggunakan mekanisme hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu wilayah, semakin terhambat pula potensi peningkatan konsumsi rumah tangga secara agregat. Keadaan ini berimplikasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena rendahnya konsumsi masyarakat berarti rendahnya permintaan agregat, yang pada gilirannya memperlambat aktivitas produksi dan penciptaan lapangan kerja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator rata-rata pendapatan masyarakat suatu daerah, memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong konsumsi rumah tangga. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Apabila PDRB per kapita mengalami peningkatan,

maka secara umum dapat diasumsikan bahwa pendapatan masyarakat juga meningkat. Sesuai dengan pandangan Keynes, peningkatan pendapatan ini akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsinya, baik dalam bentuk barang konsumsi sehari-hari maupun barang dan jasa yang bersifat lebih sekunder atau tersier. Namun demikian, peningkatan konsumsi tidak akan sama besar dengan peningkatan PDRB per kapita, karena sebagian dari tambahan pendapatan tersebut akan disimpan sebagai tabungan. Kendati demikian, konsumsi tetap mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme permintaan agregat. ketiga variabel tersebut – IPM, tingkat kemiskinan, dan PDRB per kapita – memiliki keterkaitan yang erat dengan pola konsumsi rumah tangga sebagaimana dijelaskan oleh Teori Konsumsi Keynesian. Peningkatan IPM akan memperbaiki kualitas manusia sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi. Sebaliknya, tingginya tingkat kemiskinan menjadi penghalang utama dalam peningkatan konsumsi karena keterbatasan pendapatan disposabel. Sementara itu, kenaikan PDRB per kapita sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi regional akan secara langsung meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat dan selanjutnya mendorong konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, analisis terhadap konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari ketiga variabel tersebut, karena masing-masing berperan sebagai determinan penting dalam menjelaskan dinamika konsumsi masyarakat sepanjang periode 2016–2024.

2.1.2 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen paling dominan dalam perekonomian, karena menggambarkan besarnya pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, maupun kebutuhan sekunder serta tersier seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi (Mankiw, 2019). Dalam analisis makroekonomi, konsumsi rumah tangga berperan besar dalam membentuk permintaan agregat, bahkan di Indonesia

kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara konsisten menempati porsi terbesar dibandingkan dengan komponen lain seperti investasi, pengeluaran pemerintah, maupun ekspor-impor (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan dalam pola konsumsi masyarakat akan berimplikasi langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah maupun negara, Konsumsi rumah tangga tidak hanya merefleksikan daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting untuk menilai kesejahteraan ekonomi. Lebih lanjut, pola konsumsi rumah tangga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, di antaranya kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan yang membatasi kemampuan daya beli, serta pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui PDRB per kapita (Todaro & Smith, 2020). Oleh sebab itu, analisis konsumsi rumah tangga sangat relevan digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi dan sosial mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada level regional maupun nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat dari Rp389,6 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp620 triliun pada 2023-2024, mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional yang relatif stabil di atas 5% per tahun. Struktur konsumsi rumah tangga di Indonesia masih didominasi oleh pengeluaran untuk bahan makanan yang menyumbang hampir setengah dari total pengeluaran, dengan padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, sayur, dan buah sebagai komponen utama (Badan Pusat Statistik, 2023). Khusus untuk konsumsi beras, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan adanya tren penurunan rata-rata konsumsi per kapita dari 102,87 kg pada 2011 menjadi sekitar 93,79 kg pada 2023, dan diproyeksikan terus menurun hingga 2026 (Badan Pusat Statistik, 2011–2023; Badan Pangan Nasional, 2024). Hal ini mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari yang semula terpusat pada beras ke arah variasi bahan pangan lain (Badan Pangan Nasional, 2024). Di sisi lain, pengeluaran per kapita untuk bahan pangan tertentu seperti kacang-kacangan dan buah-buahan justru meningkat seiring dengan diversifikasi konsumsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi ini antara lain inflasi yang menyebabkan kenaikan indeks harga konsumen (IHK) untuk makanan dan non-makanan, sehingga dengan uang yang sama masyarakat membeli lebih sedikit barang, serta kebijakan pembangunan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, Jawa Tengah sebagai salah satu pusat produksi pangan nasional dengan kontribusi sekitar 16,7% produksi beras nasional turut mempengaruhi ketersediaan dan pola konsumsi lokal. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat secara nominal juga terlihat dari kenaikan pengeluaran riil yang menunjukkan adanya peningkatan nyata dalam tingkat konsumsi, di mana pertumbuhan pengeluaran riil pada tahun-tahun terakhir mencapai sekitar 12,69%. Dengan populasi Jawa Tengah yang diperkirakan mencapai sekitar 38,2 juta jiwa pada 2025, konsumsi rumah tangga di provinsi ini menjadi motor penting dalam dinamika ekonomi Jawa Tengah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan peran vital di sektor pertanian dan industri. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah selama periode ini didasarkan pada peningkatan pendapatan dan daya beli, inflasi, perubahan preferensi konsumsi, serta kondisi ekonomi dan sosial yang membentuk pola pengeluaran yang dinamis dan terus berkembang

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

IPM digunakan secara luas untuk menilai sejauh mana suatu daerah atau negara berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduknya, tidak hanya dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari aspek kesehatan dan pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), penghitungan IPM di Indonesia didasarkan pada tiga indikator utama, yakni angka harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan derajat kesehatan masyarakat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang mencerminkan akses dan kualitas pendidikan, serta pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan sebagai ukuran standar hidup. Dengan demikian, IPM mencerminkan kualitas pembangunan manusia secara multidimensi yang tidak bisa diukur hanya dengan pendapatan atau pertumbuhan

ekonomi. IPM memiliki peran penting dalam analisis pembangunan ekonomi dan sosial karena dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah maupun antar waktu. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat hanya dipahami sebagai peningkatan output atau pendapatan per kapita, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih sehat, berpendidikan, dan produktif. Oleh karena itu, IPM sering dijadikan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, IPM menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana pembangunan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Lebih lanjut, IPM juga sering digunakan sebagai salah satu indikator yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi makro. Menurut Sukirno (2016), kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam IPM sangat memengaruhi produktivitas tenaga kerja, daya saing ekonomi, serta keberlanjutan pertumbuhan. Daerah dengan IPM tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih produktif dan berpendidikan, yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan PDRB dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya IPM sering kali mencerminkan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, yang berdampak pada rendahnya kualitas tenaga kerja serta terbatasnya kapasitas konsumsi rumah tangga. Dalam analisis sosial ekonomi, IPM juga berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith (2020) peningkatan IPM umumnya diikuti dengan penurunan angka kemiskinan, karena perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan meningkatkan peluang pendapatan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh studi Minarni (2021) yang menemukan bahwa peningkatan IPM di tingkat regional di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, IPM tidak hanya menjadi indikator kesejahteraan, tetapi juga merupakan variabel penting dalam menentukan daya beli masyarakat serta struktur konsumsi rumah tangga. IPM menjadi instrumen utama untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi yang terjadi benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang besar,

peningkatan IPM di Jawa Tengah menunjukkan adanya kemajuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan yang konsisten selama periode 2016–2022, meskipun terdapat perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada aspek pendidikan dan pendapatan. Kenaikan IPM di Jawa Tengah mencerminkan adanya perbaikan akses pendidikan melalui meningkatnya rata-rata lama sekolah, membaiknya layanan kesehatan yang meningkatkan angka harapan hidup, serta meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. IPM dapat dipahami sebagai indikator komprehensif yang menjembatani antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Peningkatan IPM secara konsisten akan meningkatkan produktivitas, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya beli masyarakat melalui konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, IPM diposisikan sebagai salah satu variabel penting yang memengaruhi konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah, bersama dengan kemiskinan dan PDRB per kapita, dalam kurun waktu 2016–2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komprehensif yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah melalui tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dalam konteks Jawa Tengah selama periode 2016–2024, IPM menjadi indikator penting untuk menilai perkembangan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di provinsi tersebut.

Secara teoritis, IPM dihitung berdasarkan indikator harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan kesehatan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang mencerminkan pendidikan, serta pengeluaran per kapita disesuaikan sebagai ukuran standar hidup layak. Semakin tinggi IPM, menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Data BPS Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan IPM secara konsisten dari tahun ke tahun, dengan angka IPM mencapai 73,87 pada tahun 2024, yang merupakan kenaikan 0,48 poin dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh semua komponen penyusun IPM, termasuk harapan hidup yang mencapai 74,91 tahun, harapan lama sekolah sekitar 12,86

tahun, dan rata-rata lama sekolah sebanyak 8,02 tahun. Standar hidup layak juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan peningkatan sekitar 3,73 persen dalam pengeluaran riil per kapita. Konsep pembangunan manusia sebagaimana diukur oleh IPM mencerminkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup manusia sebagai fondasi utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif. Dalam pembangunan daerah, peningkatan IPM menunjukkan kemajuan dalam pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pendapatan yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menjalankan program-program spesifik seperti layanan kesehatan keliling (Speling) untuk meningkatkan skrining kesehatan masyarakat, serta berbagai inisiatif untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan ekonomi lokal yang berkontribusi pada peningkatan IPM. Studi juga menunjukkan hubungan positif antara peningkatan kepadatan penduduk dengan kenaikan IPM di kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang mengindikasikan bahwa konsentrasi penduduk yang terlayani dengan baik dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, IPM bukan hanya sebagai indikator statistik, tetapi juga alat penting dalam perencanaan strategis untuk pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah pada rentang waktu 2016-2024, yang menggabungkan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup dalam upaya menjawab tantangan pembangunan daerah

2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan di Jawa Tengah merupakan masalah sosial ekonomi yang kompleks yang dapat diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan secara layak. Secara teori, kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan yang rendah, tetapi juga mencakup dimensi multisektoral yang meliputi keterbatasan akses terhadap sumber daya, pelayanan dasar, dan kesempatan ekonomi. Dalam konteks Jawa

Tengah, kemiskinan secara spasial menunjukkan pola khusus dengan konsentrasi tinggi di beberapa wilayah tertentu seperti kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Purworejo yang menjadi hotspot kemiskinan dari tahun 2012 hingga 2022. Indeks Moran yang digunakan untuk analisis spasial menunjukkan adanya pola berkelompok (cluster) kemiskinan meskipun dengan kekuatan korelasi yang lemah, mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki kesamaan kondisi sosial ekonomi. Data statistik menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan absolut dari sekitar 17,72% pada 2009 menjadi sekitar 10-12% pada dekade berikutnya, tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten masih termasuk kategori tinggi dengan kemiskinan absolut lebih dari 20%. Selain itu, indikator lain seperti Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan juga menjadi penting untuk mengukur intensitas dan beratnya kemiskinan, yang pada Jawa Tengah menurun pada rentang 2016-2019 namun sempat mengalami kenaikan kembali pada 2020 akibat berbagai faktor termasuk dampak pandemi COVID-19.

Penanganan kemiskinan di Jawa Tengah harus memperhatikan karakteristik geografis dan demografis wilayah, serta mengintegrasikan kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Pemerintah daerah melalui berbagai program sosial dan ekonomi berupaya mengurangi kemiskinan dengan strategi yang berbasis data spasial dan sosial sehingga upaya tersebut dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut. Studi empiris juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara penurunan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor kesehatan serta pendidikan, yang menegaskan bahwa investasi di bidang sosial merupakan kunci utama untuk mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan di Jawa Tengah. Kemiskinan merupakan salah satu masalah fundamental dalam pembangunan ekonomi yang mencerminkan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri terdiri dari komponen garis kemiskinan makanan, yaitu nilai pengeluaran minimum untuk mencukupi kebutuhan kalori 2.100 kkal per kapita per hari, serta garis kemiskinan non-makanan yang mencakup kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, seseorang atau rumah tangga dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan (BPS, 2023). Secara konseptual, kemiskinan dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan. Todaro dan Smith (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Senada dengan hal tersebut, Amartya Sen (1999) melalui *capability approach* menegaskan bahwa kemiskinan adalah keterbatasan kemampuan (capabilities) untuk menjalani kehidupan yang bernilai, seperti hidup sehat, berpendidikan, dan memiliki standar hidup yang layak. Artinya, kemiskinan bukan hanya masalah kekurangan pendapatan, tetapi juga menyangkut ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya pembangunan.

Dalam perspektif makroekonomi, Sukirno (2016) menyebutkan bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja. Daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pun belum tentu mampu mengurangi kemiskinan apabila pertumbuhan tersebut tidak inklusif dan tidak menciptakan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu, kemiskinan seringkali menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi tantangan besar pembangunan, terutama di provinsi dengan jumlah penduduk besar seperti Jawa Tengah. BPS (2023) mencatat bahwa meskipun angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun, provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Faktor penyebabnya antara lain masih tingginya proporsi

tenaga kerja di sektor informal dengan produktivitas rendah, kesenjangan antar wilayah, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sempat mendorong meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Tengah karena melemahnya aktivitas ekonomi, menurunnya pendapatan rumah tangga, serta terbatasnya kesempatan kerja.

Kemiskinan juga memiliki implikasi langsung terhadap pola konsumsi rumah tangga. Rumah tangga miskin cenderung mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan dasar, terutama pangan, sementara alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan produktif lainnya relatif kecil (Mankiw, 2019). Kondisi ini dapat memperburuk lingkaran kemiskinan karena keterbatasan investasi dalam sumber daya manusia akan menurunkan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dalam konteks penelitian ini, kemiskinan diposisikan sebagai variabel penting yang memengaruhi konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah. Tingginya tingkat kemiskinan dapat membatasi kapasitas konsumsi rumah tangga karena rendahnya pendapatan disposabel yang dimiliki. Sebaliknya, penurunan angka kemiskinan akan memperluas basis konsumsi, meningkatkan permintaan agregat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Oleh sebab itu, analisis hubungan antara kemiskinan dan konsumsi rumah tangga menjadi relevan untuk memahami dinamika pembangunan ekonomi dan sosial di Jawa Tengah pada periode 2016–2023.

2.1.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makroekonomi penting yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha

di suatu daerah dalam periode tertentu, baik dari sektor produksi barang maupun jasa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), PDRB dapat dihitung dengan dua pendekatan, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku pada periode tertentu, sehingga PDRB ADHB memberikan gambaran nominal mengenai besarnya perekonomian suatu daerah tanpa memperhitungkan faktor inflasi. Dengan kata lain, PDRB ADHB menunjukkan nilai ekonomi riil yang diterima masyarakat dan pemerintah dalam bentuk pendapatan pada periode tertentu.

Dalam kerangka analisis ekonomi regional, PDRB ADHB sering dijadikan sebagai salah satu ukuran penting untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat suatu daerah. Hal ini karena PDRB ADHB secara langsung mencerminkan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi, baik yang berasal dari sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor sekunder seperti industri pengolahan dan konstruksi; maupun sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, dan jasa lainnya. Menurut Sukirno (2016), PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur perekonomian, pola distribusi pendapatan antar sektor, serta perkembangan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun.

Dalam konteks Jawa Tengah, PDRB ADHB memiliki makna penting karena provinsi ini merupakan salah satu penopang utama perekonomian di Pulau Jawa sekaligus di Indonesia. Nilai PDRB ADHB Jawa Tengah selalu menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, yang berarti bahwa aktivitas ekonomi masyarakat semakin meningkat dari sisi nominal. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berkembangnya berbagai sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, serta jasa. Namun, karena dihitung atas dasar harga berlaku, nilai PDRB ADHB tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perubahan harga (inflasi). Oleh sebab itu, analisis PDRB ADHB lebih tepat digunakan untuk menilai besarnya skala perekonomian secara nominal serta tingkat pendapatan per kapita masyarakat.

PDRB ADHB juga berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat karena dapat digunakan untuk menghitung indikator pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB ADHB dengan jumlah penduduk pada periode tertentu. Indikator ini memberikan gambaran mengenai rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Apabila PDRB ADHB meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, maka pendapatan per kapita akan meningkat dan hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan PDRB ADHB, maka pendapatan per kapita cenderung stagnan atau menurun.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah merupakan salah satu indikator fundamental dalam memahami dinamika ekonomi regional sekaligus kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan PDRB ADHB menunjukkan bertambahnya nilai aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konsumsi rumah tangga, menurunkan tingkat kemiskinan, dan memperbaiki kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, PDRB ADHB menjadi landasan yang penting dalam analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pola konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah

2.2 Studi Terkait

Penelitian oleh Sirry (2024) menyoroti pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konsumsi rumah tangga di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2019–2023. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa IPM memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Artinya, semakin tinggi kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari pendidikan, kesehatan, dan standar hidup maka konsumsi rumah tangga juga meningkat. IPM mencerminkan kapasitas masyarakat untuk mengakses barang dan jasa, sehingga ketika IPM naik, daya beli dan pola konsumsi cenderung membaik dan lebih beragam.

Cao, Meng & Gao (2021) meneliti pola konsumsi energi rumah tangga di daerah pedesaan Provinsi Henan, Tiongkok, serta faktor-faktor penentunya. Salah satu faktor penting yang mereka identifikasi adalah aspek pembangunan manusia, terutama dalam bentuk pendidikan dan kesadaran lingkungan. Rumah tangga dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang lebih tinggi cenderung mengadopsi sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia berkontribusi terhadap pergeseran pola konsumsi, tidak hanya dalam kuantitas tetapi juga kualitas dan orientasi konsumsi, termasuk dalam bidang energi rumah tangga.

Penelitian oleh Knickmeyer (2020) mengulas berbagai faktor sosial yang mempengaruhi perilaku pemisahan sampah rumah tangga, terutama di wilayah perkotaan. Kajian ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia yang ditunjukkan melalui pendidikan dan partisipasi sosial memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam praktik konsumsi yang berkelanjutan, seperti daur ulang dan pengurangan sampah. Pola konsumsi rumah tangga yang sadar lingkungan tidak terlepas dari kualitas pembangunan manusia yang mendorong perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memengaruhi kuantitas konsumsi tetapi juga memperbaiki kualitas keputusan konsumsi dalam konteks sosial dan ekologis.

Penelitian oleh Harahap (2021) meneliti pengaruh pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi. Rumah tangga miskin dengan pendapatan rendah cenderung mengalokasikan pengeluaran pada kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal, sementara konsumsi untuk pendidikan, kesehatan, dan rekreasi sangat terbatas. Penelitian ini menegaskan bahwa kemiskinan secara langsung membatasi keragaman dan kualitas pola konsumsi rumah tangga.

Abdillah (2020) dalam disertasinya mengenai Provinsi Jawa Tengah juga menekankan bahwa tingkat kemiskinan memengaruhi struktur konsumsi rumah tangga

secara signifikan. Rumah tangga miskin cenderung memiliki rasio pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan yang tinggi, sehingga hampir seluruh penghasilan digunakan untuk kebutuhan dasar. Penurunan daya beli menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk mengakses barang dan jasa yang berkualitas, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan. Pola konsumsi rumah tangga miskin menjadi cerminan dari ketimpangan ekonomi yang terjadi secara sistemik.

Francis-Devine, Booth & McGuinness (2020) dalam laporan mereka mengenai kemiskinan di Inggris mengungkapkan bahwa rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami keterbatasan signifikan dalam memilih produk konsumsi, khususnya pada sektor non-pangan. Studi ini menyoroti bahwa kondisi kemiskinan menimbulkan konsekuensi multidimensi, termasuk kerentanan terhadap inflasi harga kebutuhan pokok, ketidakstabilan pendapatan, dan akses terbatas terhadap pendidikan serta pekerjaan yang layak. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan konsumsi antar kelompok masyarakat.

Penelitian Dewi & Curry (2024) mengkaji hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan inflasi terhadap konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hasil studi menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Artinya, ketika PDRB meningkat, pendapatan masyarakat juga cenderung naik, sehingga daya beli dan pola konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan. Namun, variabel inflasi ditemukan memiliki pengaruh negatif, karena kenaikan harga-harga barang mengurangi kemampuan konsumsi masyarakat, terutama pada kebutuhan non-pokok.

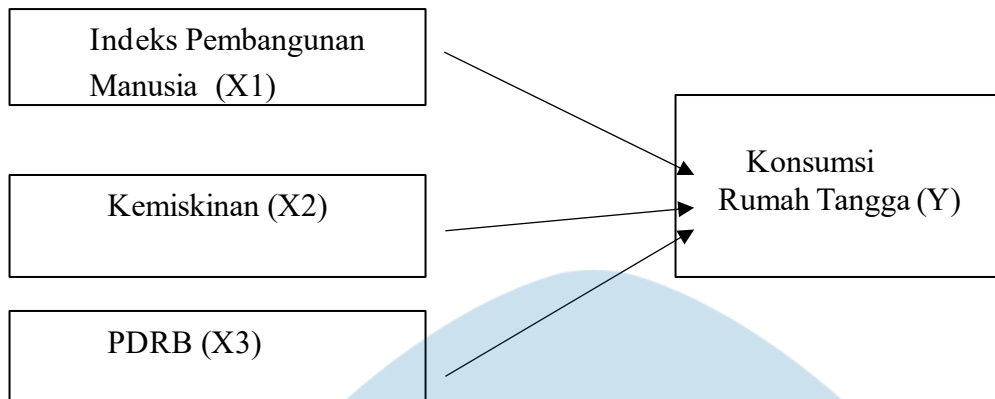
Soleh et al. (2023) memperkuat temuan tersebut melalui studi di Provinsi Jambi, yang menyimpulkan bahwa pendapatan per kapita yang menjadi bagian dari PDRB regional secara signifikan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Inflasi, meskipun berpengaruh negatif, cenderung berdampak jangka pendek dibandingkan pengaruh jangka panjang dari pertumbuhan pendapatan. Studi ini menyoroti bahwa keberhasilan daerah dalam meningkatkan PDRB per kapita dapat menjadi instrumen penting untuk

memperbaiki kesejahteraan konsumsi rumah tangga, terutama dalam hal diversifikasi dan peningkatan kualitas konsumsi.

Dalam konteks global, penelitian oleh Coibion et al. (2024) di *American Economic Review* menunjukkan bahwa ketidakpastian makroekonomi, termasuk fluktuasi PDB nasional, mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga secara signifikan. Dalam situasi ketidakpastian, meskipun pendapatan rumah tangga tetap atau meningkat, mereka cenderung menahan konsumsi dan meningkatkan tabungan. Kami menemukan prediktor kerentanan finansial terhadap kerusakan termasuk usia, menjadi orang tua, penyakit, dan dukungan sosial. Hasil ini dapat membantu meningkatkan alokasi bantuan pemerintah setelah bencana di masa mendatang.

Islam et al. (2022) dalam penelitiannya menyelidiki apakah peristiwa iklim ekstrem memiliki dampak heterogen pada pertanian setiap wilayah melalui konsumsi makanan rumah tangga. Dengan menggunakan tiga putaran kumpulan data longitudinal yang mewakili secara nasional dan menggunakan pendekatan perbedaan-dalam-perbedaan (DiD), hasilnya mengonfirmasi bahwa daerah-daerah yang rawan siklon dan salinitas di negara itu lebih rentan, diikuti oleh daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan dan banjir dari konsumsi makanan sereal. Dalam jangka panjang (2011–19), Model 1 (konsumsi pangan sereal per rumah tangga) signifikan pada tingkat 1% dan 10%, masing-masing, di daerah rawan siklon dan kekeringan, tetapi untuk daerah rawan banjir, tidak signifikan. Selain itu, analisis yang mempertimbangkan keseluruhan sampel tahun dasar sebagai kontrol juga mendukung bahwa variabilitas iklim dan korelasinya berdampak negatif pada konsumsi pangan pokok rumah tangga.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mencerminkan suatu wilayah melalui 3 hal utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kesehatan yang baik meningkatkan kapasitas fisik dan produktivitas rumah tangga, pendidikan memberikan konsumsi, sementara standar hidup yang layak mencerminkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Hasil penelitian sirry (2024) di provinsi kalimantan selatan menunjukkan bahwa peningkatan ipm berpengaruh positif terhadap konsumsi rumah tangga. rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kesehatan yang lebih baik, dan standar hidup yang layak mampu meningkatkan daya beli, sehingga pengeluaran konsumsi tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi juga kebutuhan sekunder dan tersier. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia memungkinkan rumah tangga untuk mengalokasikan pengeluarannya secara lebih optimal dan beragam. Penelitian Cao, Meng & Gao (2021) di Provinsi Henan, Tiongkok, mendukung temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pendidikan dan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari pembangunan manusia mendorong rumah tangga

mengadopsi pola konsumsi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa IPM tidak hanya memengaruhi jumlah konsumsi, tetapi juga kualitas konsumsi, termasuk kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Knickmeyer (2020) menekankan bahwa aspek pendidikan dan partisipasi sosial berperan penting dalam membentuk perilaku konsumsi rumah tangga yang lebih bertanggung jawab, seperti pemilahan sampah dan pengurangan limbah. Dengan kata lain, peningkatan IPM mendorong rumah tangga untuk membuat keputusan konsumsi yang lebih rasional, efisien, dan berkualitas, tidak hanya pada segi kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan dampak sosial-ekologis.

H₁: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah

2.4.2 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga

Tingkat kemiskinan mencerminkan keterbatasan pendapatan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga rumah tangga miskin cenderung memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, sementara pengeluaran untuk kebutuhan non-pangan seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi menjadi sangat terbatas (Harahap, 2021; Abdillah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan secara langsung membatasi keragaman dan kualitas konsumsi rumah tangga. Penelitian Francis-Devine, Booth, & McGuinness (2020) menegaskan bahwa rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami keterbatasan signifikan dalam memilih produk konsumsi, terutama di sektor non-pangan. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi, seperti kerentanan terhadap inflasi harga kebutuhan pokok, ketidakstabilan pendapatan, dan akses terbatas terhadap pendidikan serta pekerjaan yang layak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada kuantitas konsumsi, tetapi juga pada kualitas, keragaman, dan keberlanjutan pola konsumsi rumah tangga. Lalu menurut Abdillah (2020) dalam penelitiannya di Provinsi Jawa Tengah menambahkan

bahwa rumah tangga miskin cenderung mengalokasikan hampir seluruh pendapatannya untuk kebutuhan dasar, sehingga daya beli terhadap barang dan jasa yang berkualitas menjadi sangat terbatas. Pola konsumsi rumah tangga miskin ini menjadi cerminan ketimpangan ekonomi yang sistemik dan memperlihatkan keterbatasan akses terhadap peningkatan kesejahteraan melalui pengeluaran konsumsi.

H₂: Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap perubahan pola konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah

2.4.3 Pengaruh PDRB Terhadap Konsumsi Rumah tangga

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah pada tahun berjalan sesuai harga pasar saat itu. Penelitian Dewi & Curry (2024) di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa ketika PDRB ADHB meningkat, pendapatan masyarakat ikut naik, sehingga daya beli rumah tangga meningkat dan pengeluaran untuk kebutuhan pokok maupun non-pokok ikut bertambah. Temuan lain dari Soleh et al. (2023) di Provinsi Jambi mendukung hal ini, bahwa pertumbuhan PDRB ADHB per kapita secara signifikan mendorong pengeluaran konsumsi rumah tangga. Meskipun inflasi dapat menurunkan kemampuan konsumsi dalam jangka pendek, secara keseluruhan peningkatan PDRB ADHB tetap meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

H₃: PDRB berpengaruh positif terhadap perubahan konsumsi rumah tangga petani di Jawa Tengah.